

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N., dan Vijay Govindarajan. 2014. *Management Control System*. New York: McGraw Hill.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kabupaten Jepara dalam Angka 2015*.
- Bryson, J. M., dan Farnum K. Alston. 2011. *Creating Your Strategic Plan Third Edition : A Workbook For Public and Nonprofit Organizations*. United States of America: Jossey-Bass.
- Devas, Nick dkk.1989.*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Terjemahan oleh Masri Maris, UI Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Booklet Pajak Bumi dan Bangunan*. Kementrian Keuangan RI.
- Gandellini, Giorgio, Alberto Pezzi, danDaniela Venanzi. 2012. *Strategy for Action-I: The Logic and Context of Strategic Management*. New York: Springer.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kelly, Roy. 2013. *Making the Property Tax Work*. Working Paper, The Andrew Young School of Policy Studies.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia.2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McCluskey, William J., dan Igor Bevc. 2007. Fiscal decentralization in the Republic of Slovenia: an opportunity for the property tax. *Property Managemet*, 25 (4), 400-419.
- Megawati, Retno, Siti Ragil Handayani, dan Bambang Ismono. 2015. Implementasi Atas Desentralisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*, 4 (2).

- Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.*
- Munawaroh, Siti dkk. 2014. Dampak Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Peluang dan Tantangan. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 02 (01), 9-13.
- Nurtanzilla, Lastria, dan Wahyudi Kumorotomo. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 oleh Pusat Kepada Daerah. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19 (2), 157-169.
- Pemerintah Kabupaten Jepara. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*
- Prasetya, Rocky Fergia. 2015. *Analisis Strategi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) setelah dilimpahkan kepada pemerintah daerah serta efektivitas dan kontribusinya sebagai pajak daerah di Kota Magelang.* Yogyakarta: Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- Prathiwi, Ida Ayu Metha Apsari, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2014. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *Jurnal Akuntansi Program SI*, 3 (1).
- Saputro, Rudi, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2 (1).
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach Fifth Edition.* John Wiley and Sons Ltd.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. .
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Wajianti,Rochim. 2014. *Implementasi Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas dan Kontribusinya Sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Gadjah Mada.

Yin, R. K. 2011.*Qualitative Research From Start to Finish*. New York: The Guilford Press